

Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Periode 2005-2022

Erina Mega Alliyah¹, Prasetio Ariwibowo², & Mima Nizma³

^{1,2,3}Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 04 Oktober 2024

Revised: 03 Desember 2024

Accepted: 06 Desember 2024

Keywords:

Kemiskinan;

Pengangguran;

Upah Minimum;

Sumatera Utara.

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect of wages on poverty, the influence of economic unemployment on poverty, the effect of wages and unemployment on poverty in North Sumatra. With a quantitative method, this study uses secondary data as a sample and research population with the time range of 2005-2022, namely minimum wage data, unemployment rate, and poverty in North Sumatra. This study uses multiple regression analysis with SPSS analysis test tool version 24.00 which tests validity, reliability, to test determination and test hypotheses using the F Test and T Test. The results and conclusions of this study are that the minimum wage partially does not have a significant effect on poverty in North Sumatra in 2005-2022, Unemployment does not partially affect poverty in North Sumatra in 2005-2022, Minimum wage and unemployment as a whole have a significant effect on poverty in North Sumatra in 2005-2022, Every 1% increase in the minimum wage, the poverty rate will decrease by 65.7% and if unemployment increases by 1%, the poverty rate will increase by 32.8%. As well as the contribution of the minimum wage and unemployment to the poverty rate of 80.20%.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh upah terhadap kemiskinan, pengaruh pengangguran ekonomi terhadap kemiskinan pengaruh upah dan pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Dengan metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sampel dan populasi penelitian dengan rentang waktu tahun 2005-2022 yaitu data upah minimum, tingkat pengangguran serta kemiskinan di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan alat bantu uji analisis SPSS versi 24.00 yang menguji validitas, reliabilitas, hingga menguji determinasi dan menguji hipotesis menggunakan Uji F dan Uji T. Hasil dan Kesimpulan dari penelitian ini adalah Upah minimum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2005-2022, Pengangguran secara tidak parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2005-2022, Upah minimum dan pengangguran secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2005- 2022, Setiap kenaikan 1% upah minimum maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 65,7 % dan jika pengangguran naik 1% maka tingkat kemiskinan meningkat 32,8%. Serta kontribusi Upah minimum dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan sebesar 80,20%.



© 2024 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Prasetio Ariwibowo

Email: wibowoprasetyo648@gmail.com

How to Cite: Alliyah, E.M., Ariwibowo, P, Mima, N. (2024). Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Periode 2005-2022. *Sosio e-Kons*, 16 (3), 279-287

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu menjadi pusat perhatian oleh pemerintah di negara manapun dan selalu menjadi masalah global. Kemiskinan secara absolut dapat diukur berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak untuk hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok yang dimaksud sebagai tolak ukur finansial dalam bentuk uang. Minimum nilai kebutuhan pokok dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatnya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Hal ini dikarenakan Di tengah majunya perekonomian di suatu negara,/daerah, maka semakin banyak jumlah uang dan barang/jasa yang beredar di suatu negara/wilayah (Ariwibowo, 2016).

Menurut (Karimi et al., 2023) masalah ketimpangan akan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia karena mereka yang kaya akan cenderung semakin kaya dan mereka yang miskin akan semakin miskin. Adanya perbedaan pendapatan yang tinggi ini membuat masyarakat cenderung tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi dapat dikatakan bahwa kemiskinan memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pendapatan, karena adanya jarak antara individu kaya dengan individu miskin dan masyarakat miskin akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan akan lebih mudah masuk kedalam garis kemiskinan.

Arsyad dalam (Mahsunah, 2022) mengatakan kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi. Artinya dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa pengetahuan dan keterampilan yang rendah, miskin aset serta organisasi sosial politik. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan sumber keuangan, informasi, dan jaringan sosial. Kemiskinan muncul karena beberapa orang belum mampu mengelola kehidupan mereka dengan standar kemanusiaan. Menurut (Purnama, 2017) hal ini yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan terhadap produktivitas dan pendapatan.

Tabel 1
Data Kemiskinan 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2022

No	Nama Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
		2022	2021	2020	2019	2018
1	Papua	26.56	26.86	26.64	27.53	27.74
2	Papua Barat	21.33	21.84	21.37	22.17	23.01
3	Nusa Tenggara Timur	20.05	20.99	20.90	21.09	21.35
4	Maluku	15.97	17.87	17.44	17.69	18.12
5	Gorontalo	15.42	15.61	15.22	15.52	16.81
6	Aceh	14.64	15.33	14.99	15.32	15.97
7	Bengkulu	14.62	15.22	15.03	15.23	15.43
8	Nusa Tenggara Barat	13.68	14.14	13.97	14.56	14.75
9	Sulawesi Tengah	12.33	13.00	12.92	13.48	14.01
10	Sumatera Selatan	11.90	12.84	12.66	12.71	12.80
11	Sulawesi Barat	11.75	11.29	10.87	11.02	11.25
12	Lampung	11.57	12.62	12.34	12.62	13.14
13	DI Yogyakarta	11.34	12.80	12.28	11.70	12.13
14	Sulawesi Tenggara	11.17	11.66	11.00	11.24	11.63
15	Jawa Tengah	10.93	11.79	11.41	10.80	11.32
16	Jawa Timur	10.38	11.40	11.09	10.37	10.98
17	Sulawesi Selatan	8.63	8.78	8.72	8.69	9.06
18	Sumatera Utara	8.42	9.01	8.75	8.83	9.22
19	Jawa Barat	8.06	8.40	7.88	6.91	7.45
20	Jambi	7.62	8.09	7.58	7.60	7.92
21	Sulawesi Utara	7.28	7.77	7.62	7.66	7.80
22	Riau	6.78	7.12	6.82	7.08	7.39
23	Kalimantan Utara	6.77	7.36	6.80	6.63	7.09
24	Kalimantan Barat	6.73	7.15	7.17	7.49	7.77
25	Kalimantan Timur	6.31	6.54	6.10	5.94	6.03

26	Kepulauan Riau	6.24	6.12	5.92	5.90	6.20
27	Maluku Utara	6.23	6.89	6.78	6.77	6.64
28	Banten	6.16	6.66	5.92	5.09	5.24
29	Sumatera Barat	5.92	6.63	6.28	6.42	6.65
30	Kalimantan Tengah	5.28	5.16	4.82	4.98	5.17
31	DKI Jakarta	4.69	4.72	4.53	3.47	3.57
32	Bali	4.57	4.53	3.78	3.79	4.01
33	Kalimantan Selatan	4.49	4.83	4.38	4.55	4.54
34	Kep. Bangka Belitung	4.45	4.90	4.53	4.62	5.25

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)

Angka kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2022 menduduki peringkat 18 secara nasional (BPS, RI, 2023). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan provinsi mengalami tercatat berjumlah 9,01 persen pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 jumlahnya 8,42. Sehingga mengalami penurunan sebesar 0,59.

Tabel 2
Persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera tahun 2018-2022

No	Provinsi	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Sumatera Barat	6.65	6.42	6.28	6.63	5.92
2	Sumatera Utara	9.22	8.83	8.75	9.01	8.42
3	Lampung	13.14	12.62	12.34	12.62	11.57

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)

Dari data tabel 2 menunjukkan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke dua. Dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin Sumatera Utara jumlahnya tidak stabil. Ketidakstabilan jumlah persentase penduduk miskin ditunjukkan pada tahun 2018 sampai 2022 persentase penduduk miskin menurun dari 9,22 pada tahun 2018 menjadi 8,42 pada tahun 2022. Kemudian penduduk meningkat pada tahun 2021 sebanyak 9,01 dan turun 8,75 pada tahun 2020. Tentunya jumlah persentase kemiskinan yang tidak stabil dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya Upah Minimum dan Pengangguran.

Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara selama periode 2005-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Upah Minimum di Pulau Sumatera dalam hitungan Rupiah (Rp) tahun 2018-2022

No	Provinsi	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Sumatera Barat	2.119.067	2.289.220	2.484.041	2.484.041	2.512.539
2	Sumatera Utara	2.132.189	2.303.403	2.499.423	2.499.423	2.522.610
3	Lampung	2.074.673	2.241.270	2.432.002	2.432.002	2.440.486

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)

Selain kemiskinan, upah minimum juga mempunyai peran penting untuk mengurangi ketimpangan kesenjangan yang terjadi. Indonesia menetapkan kebijakan dan tingkat upah minimum regional yang berbedabeda di setiap provinsi. Salah satu contohnya ialah provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Provinsi yang berada di Pulau Sumatera menetapkan tingkat upah minimum regional yang beragam dari paling rendah sampai paling tinggi. Provinsi yang terendah menetapkan upah minimum regional adalah Lampung. Sementara itu, provinsi yang tertinggi menetapkan upah minimum regional adalah Sumatera Utara.

Upah minimum sering dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi perbedaan pendapatan yang ada dimasyarakat. Upah minimum memiliki fungsi yang lebih besar sebagai kebijakan lembaga daripada menetapkan upah terendah bagi pekerja. Upah minimum memiliki peran yang

signifikan dengan potensi untuk mempengaruhi kenaikan pendapatan secara luas dan memiliki dampak penting dalam mengurangi kemiskinan serta ketimpangan pendapatan (Karimi et al., 2023). Upah menjadi faktor penting yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dalam suatu ekonomi, meningkatnya upah minimum bisa memiliki dampak langsung terhadap tenaga kerja, sedangkan bagi pekerja peningkatan upah minimum adalah bentuk pengakuan atas nilai balas jasa dari waktu dan tenaga. (Mankiw & N.Gregory, 2000).

Dalam penelitian terdahulu oleh (Sari, 2021) menjelaskan jika tingkat upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan, penelitian (Islami dan Anis, 2019) mengatakan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Teori upah alami menjelaskan bahwa pemberian upah didasarkan kepada standar dari kebutuhan hidup yang layak seperti sandang, pangan, papan, serta pendidikan yang dalam jangka panjang akan meningkatkan taraf kualitas hidup dan kesejahteraan hidup (Mankiw, 2006).

Tabel 4

Tingkat Pengangguran di Pulau Sumatera dalam hitungan perse) tahun 2018-2022

No	Provinsi	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Sumatera Barat	5.66	6.38	6.88	6.52	6.28
2	Sumatera Utara	5.56	5.41	6.91	6.33	6.16
3	Lampung	4.04	4.03	4.67	4.69	4.52

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)

Adapun pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah kemiskinan. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena ketika angka pengangguran meningkat, maka dampaknya suatu negara membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Tingkat pengangguran juga merupakan kunci dari kinerja perekonomian. Pengangguran menunjukkan persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Penyediaan lapangan pekerjaan dapat dipengaruhi oleh tingkat produksi dan pengeluaran perusahaan. Penurunan pengangguran menjadi salah satu indikator yang baik baik perekonomian. Hal ini dikarenakan perusahaan menambah tenaga kerja dianggap berhasil menaikkan produksi dan penjualan (Baihawafi & Sebayang, 2023)

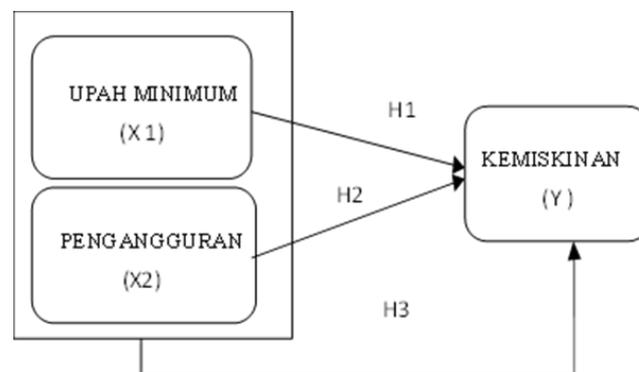
Peneliti terdahulu oleh (Sholihin, 2021) menyatakan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Namun, penelitian oleh (Ramdhan et al., 2017) menjelaskan tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Teori Keynes mengatakan bahwa pengangguran bisa menghambat tercapainya kesejahteraan karena kondisi tersebut dapat membuat seseorang tidak mendapatkan pemasukan. Akibat, hal ini permintaan agregat juga menjadi menurun dan tingkat konsumsi sangat rendah. Tingkat konsumsi yang sangat rendah ini disebabkan oleh penurunan tingkat upah yang membuat daya beli menurun. (Septera, 2020)

Namun, menurut para ahli ekonomi, peningkatan yang terjadi pada upah minimum hanya berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan, dimana semakin tinggi upah minimum maka akan mengurangi angka kemiskinan (Ramdhan et al., 2017). Sedangkan, berkaitan dengan pengangguran, peningkatan upah minimum berhubungan positif dengan tingkat pengangguran, dan semakin tinggi upah minimum maka semakin sedikit permintaan tenaga kerja yang berarti semakin banyak pengangguran (Ramdhan et al., 2017).

Dilihat dari uraian-uraian tersebut, tiga variabel yaitu upah minimum, pengangguran dan kemiskinan memiliki keterkaitan dengan permasalahan kemiskinan baik positif maupun negatif. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2023), kriteria nilai standart minimal persentase pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia sebanyak 5,95 persen, standar upah minimum di Indonesia Rp. 2,72 juta, dan standar pengangguran 5,86 persen.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di BPS provinsi Jawa Barat (Jalan Karya Bakti No.22 Pondok Cina, Beji, Kota Depok 16424) dengan akses bps.go.id. Dengan metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sampel dan populasi penelitian dengan rentang waktu tahun 2005 - 2022 yaitu data upah minimum, tingkat pengangguran serta kemiskinan di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan alat bantu uji analisis SPSS versi 24.00 yang menguji validitas, reliabilitas, hingga menguji determinasi dan menguji hipotesis menggunakan Uji F dan Uji T. Berdasarkan dasar teoritis dan hubungan antar variabel yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti mencoba membuat kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap kemiskinan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh dua variabel antara lain Upah, dan Pengangguran. Kemudian variabel-variabel tersebut sebagai variabel independent (bebas) dan bersama-sama, dengan variabel dependent (terikat) yaitu kemiskinan yang diukur dengan alat analisis regresi untuk mendapatkan tingkat signifikansinya. Skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data Sekunder Penelitian (2024)
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Diduga upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara
 H2: Diduga pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara
 H3: Diduga upah minimum dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Data Upah Minimum, Pengangguran, dan Kemiskinan di Sumatera Utara Periode 2005 - 2022

Tahun	Upah Minimum(ribu rupiah)	Pengangguran (persen)	Kemiskinan (persen)
2022	Rp 2.522.610	6.16	8.42
2021	Rp 2.499.423	6.33	9.01
2020	Rp 2.499.423	6.91	8.75
2019	Rp 2.303.403	5.41	8.83

2018	Rp 2.132.189	5.56	9.22
2017	Rp 1.961.355	5.60	10.22
2016	Rp 1.811.875	.00	10.35
2015	Rp 1.625.000	6.71	10.53
2014	Rp 1.505.850	6.23	9.85
2013	Rp 1.375.000	6.53	10.39
2012	Rp 1.200.000	6.20	10.41
2011	Rp 1.035.500	6.37	10.83
2010	Rp 965.000	7.43	11.36
2009	Rp 905.000	8.45	11.27
2008	Rp 822.205	9.10	12.47
2007	Rp 761.000	10.10	13.90
2006	Rp 737.794	11.51	15.66
2005	Rp 600.000	10.98	14.68

Sumber: BPS Sumatera Utara (2023)

Tabel 6
Analisis regresi linier berganda

Model	Coefficients ^a			
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	12.091	1.357	
	Upah	-2.010E-6	.000	-.657
	Pengangguran	.265	.117	.328

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Data primer yang telah diolah peneliti dengan SPSS 24 (2024)

$$Y = 12.091 - 0,657X_1 + 0,328X_2 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta dari persamaan regresi linier berganda pada Tabel adalah 12.091 dan bertanda positif, hal ini menjelaskan bahwa jika upah minimum dan pengangguran nilainya dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kemiskinan adalah sebesar 12.091 dengan asumsi yang lain tetap.
2. Koefisien regresi untuk variabel upah minimum adalah sebesar 0,657 dan bertanda negatif artinya upah minimum tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa setiap upah naik 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 65,7% begitu sebaliknya jika upah minimum menurun, maka kemiskinan akan meningkat.
3. Koefisien regresi untuk variabel pengangguran adalah 0.328 dan bertanda positif. Hal ini menjelaskan bahwa setiap pengangguran mengalami peningkatan 1% maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 32,8% begitu pula sebaliknya jika tingkat pengangguran menurun, maka kemiskinan akan menurun.

Tabel 7
Hasil uji T

Model	Coefficientsa			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.091	1.357		8.911	.000
Upah	-2.010E-6	.000	-.657	-4.536	.000
Pengangguran	.265	.117	.328	2.265	.039

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Data primer yang telah diolah peneliti dengan SPSS 24 (2024)

Hasil uji t untuk variabel upah minimum diperoleh t-hitung sebesar $-4,536 < t\text{-tabel}$ sebesar 2,119 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Yang artinya bahwa secara parsial variabel Upah Minimum (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini bisa dicermati dari nilai signifikan dari upah minimum sebesar $0,000 < 0,05$.

Hasil uji t variabel pengangguran diperoleh t-hitung sebesar $2,265 > t\text{-tabel}$ sebesar 2,119 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang artinya bahwa secara tidak parsial variabel pengangguran (X_2) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini bisa dicermati dari nilai signifikan dari upah minimum sebesar $0,039 < 0,05$.

Tabel 8.
Hasil Koefisien Korelasi dan determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.896a	.802	.776	.97943

a. Predictors: (Constant), Pengangguran, Upah

Sumber: Data primer yang telah diolah peneliti dengan SPSS 24 (2024)

Uji koefisien korelasi menunjukkan secara simultan nilai (Adjusted R Square) sebesar 0,776. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum dan pengangguran berkorelasi linier yang positif, searah dan tergolong sangat kuat terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.

Uji determinasi menunjukkan secara parsial nilai (R Square) sebesar 0,802. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum dan pengangguran terhadap kemiskinan sebesar 80,20%. Di sisi lain sebesar 19,80% dijelaskan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan

Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan setiap upah minimumnaik seratus ribu, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 65,7% apabila tingkat pengangguran dan Jumlah Penduduk konstan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2021) yang menjelaskan bahwa adanya ketentuan nilai upah minimum yang jumlahnya harus diatas kebutuhan hidup layak masyarakat yang artinya adanya kenaikan upah tidak akan berarti jika angka kebutuhan hidup layak masih berkisar di atas jumlah upah minimum.

Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan

Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan setiap tingkat pengangguran naik 1%, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 32,8% apabila tingkat pengangguran dan Jumlah Penduduk konstan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramdhan et al., 2017) yang menjelaskan bahwa Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Samarinda karena kegiatan perekonomian di Kota Samarinda yang semakin membaik dan berkembang dari tahun ke tahun sehingga tingkat pengangguran semakin berkurang dan pada akhirnya tingkat kemiskinan juga berkurang.

Manfaat teoritis dari penelitian ini dilakukan adalah diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bidang ekonomi pembangunan (Kemiskinan, Upah dan Pengangguran). Manfaat praktis dari penelitian ini adalah usaha untuk mencoba memberikan tindakan berapapemahaman yang tepat kepada masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan tentang pentingnya peran dan tanggung jawabnya dalam lingkungan pekerjaannya.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah- langkah yang sesuai dengan buku panduan tahun 2024 yang diberikan Universitas Indraprasta PGRI agar menghasilkan penelitian yang sempurna tidaklah mudah. Terdapat beberapa keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Keterbatasan wawasan yang dimiliki oleh peneliti
2. Keterbatasan bahan materi, seperti kurangnya buku-buku yang menjelaskan lebih detail tentang variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.
3. Keterbatasan waktu, tenaga dan dana yang dimiliki sehingga tidak memungkinkan untuk penelitian lebih lanjut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upah minimum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2005-2022.
2. Pengangguran secara tidak parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2005-2022.
3. Upah minimum dan pengangguran secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara pada tahun 2005- 2022.
4. Setiap kenaikan 1% upah minimum maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 65,7 % dan jika pengangguran naik 1% maka tingkat kemiskinan meningkat 32,8%. Serta kontribusi Upah minimum dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan sebesar 80,20%.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penetapan pada kebijakan upah minimum harus tetap dilakukan dan tingkat upahnya dinaikkan sesuai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) untuk melindungi pekerja dari kemiskinan.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih menggerakkan sektor informal, karena pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data pengangguran yang mana didalamnya terdapat golongan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

- Ariwibowo, P. (2016). Fundamental Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 2(3), 232-245.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=896612&val=14041&title=FUNDAMENTAL%20PERTUMBUHAN%20PEREKONOMIAN%20DI%20INDONESIA>

- Baihawafi, M., & Sebayang, A. F. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terbuka. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis (JRIB)*, 39–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1911>
- Dakhilullah, M. F. (2023). Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi DanKewirausahaan*, 1(1), 60–75. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i1.239>
- Karimi, K., Mulyani, P., Murialti, N., & Tibrani, T. (2023). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(1), 107–116. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4775>
- Mahsunah, D. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 2(3), 1–17. <https://doi.org/10.26740/independent.v2n3.p1-13>
- Padang, L., & Murtala, M. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 8(2), 9–16. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i1.3167>
- Ramdhan, D. A., Setyadi, D., & Wijaya, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kota Samarinda. *Inovasi*, 13(1), 1–18.
- Ryansyah, Md. C.-19 terhadap T. P. di I., & Tambunan, K. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia. *TRIANGLE JournalOf Management, Accounting, Economic and Business*, 02(04), 486–491. <http://trianglesains.makarioz.org>
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*, 10(2), 121–130.
- Sholihin, M. K. (2021). Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur. *GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis*, 1(1), 1–7.
- Yoga, I. W., & Putra, A. (2019). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ipm Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *E-Jurnal EP Unud*, 10(11), 4501–4534. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/70684/42089>